

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang sangat berkaitan dengan tindakan manajemen laba atau praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. (Menurut Anthony dan Govindarajan dalam Budiasih, 2009), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. *Agency theory* tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak di atas, baik prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai *bergaining position* masing-masing dalam menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Agen atau manajer sebagai pihak internal lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada pemilik. Manajer kemudian lebih memiliki kesempatan atau kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menimpang, yakni menggunakan informasi yang diketahuinya untuk membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih baik.

Pada teori keagenan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang disebut agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan keagenan (Anthony dan Govindarajan dalam Fauzi, 2017:7). Sesuai dengan asumsi tersebut, maka manajer akan mengambil kebijakan

yang menguntungkan dirinya sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan prinsipal, diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Dengan demikian teori keagenan (*agency theory*) berkaitan dengan usaha-usaha.

Untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan keagenan. Masalah keagenan muncul jika: (1) Terdapat perbedaan tujuan (*goals*) antara agent dan principal, (2) Terdapat kesulitan atau membutuhkan biaya yang mahal bagi principal untuk senantiasa memantau tindakan-tindakan yang diambil oleh agent. Selain itu, masalah keagenan juga akan terjadi jika antara agent dan principal mempunyai sikap atau pandangan yang berbeda terhadap risiko.

Didalam sebuah perusahaan terdapat tiga pihak utama (*major participant*) yang memiliki kepentingan berbeda yaitu manajemen, pemegang saham (sebagai pemilik), dan buruh atau tenaga kerja. Prinsip pengambilan keputusan yang diambil oleh manajer adalah bahwa manajer harus memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Atau dengan kata lain, pengambilan keputusan tidak didasarkan atas kepentingan manajemen (agen) namun harus mengacu pada kepentingan pemegang saham (principal). Namun kenyataan yang terjadi dibanyak perusahaan adalah manajer cenderung memilih tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingannya misalnya yang dapat memaksimalkan kekayaannya daripada menguntungkan pemegang saham.

2.1.2 Pengertian Pajak dan Wajib pajak

2.1.2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No.16 Tahun 2009 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.2.2 Wajib pajak

Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak terdiri dari 2, yaitu:

1. Wajib pajak Efektif

Wajib pajak Efektif adalah Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Wajib pajak Non Efektif

Sedangkan Wajib pajak Non Efektif adalah Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagai mana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016, harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak ini bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan rekonstruksi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Mekanisme pengampunan pajak berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2016 adalah dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada SPT Badan Tahun 2015 dengan cara menghitung nilai harta bersih yang mana harta bersih diperoleh dari nilai harta yang belum diungkapkan dikurangkan dengan hutang yang berkaitan dengan perolehan harta tersebut kemudian dikalikan dengan tarif uang tebusan. Menurut pasal 4 ayat 1 UU No 11 Tahun 2016 tarif uang tebusan untuk harta yang berada di dalam negara kesatuan republic indonesia atau harta

yang berada diluar negara kesatuan republik indonesia yang dialihkan dalam negara kesatuan republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling sedikit 3 tahun sejak dialihkan, mendapatkan tarif 2% untuk 3 bulan pertama sejak diundangkan dan 3% untuk bulan ke empat sampai desember 2016 dan 5% untuk periode 1 januari samapai 31 maret 2017.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 pasal 10, wajib pajak yang akan mengikuti pengampunan pajak melaporakan Surat Pernyataan kepada Menteri melalui KPP tempat terdaftaranya wajib pajak. Wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dan telah meyampaikan surat pernyataan kepada Menteri, tidak akan dilakukan:

1. Pemeriksaan
2. Pemeriksaan bukti pendahuluan
3. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan untuk masa pajak

Untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.

2.3 PSAK 70

PSAK 70 Tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam PSAK 70 paragraf 5 mendefinisikan istilah yang digunakan dalam PSAK tersebut sebagai berikut:

1. Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai asset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
2. Liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.
3. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang

perpajakan, dengan cara mengungkapkan asset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

4. Surat keterangan pengampunan pajak (Surat Keterangan) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dianggap sebagai Surat Keterangan.
5. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Dalam paragraf 9 PSAK 70 menyebutkan bahwa entitas mengakui asset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut. Dalam pengukuran dan pengakuan awal paragraf 10 sampai 13 menerangkan bahwa aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 5.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan langsung asset pengampunan pajak. Entitas mengakui selisih antara pengakuan asset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor dan entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode surat keterangan di sampaikan.

Dalam paragraf 16. pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan. Entitas dipersilahkan untuk namun tidak disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas berdasarkan

nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal surat keterangan. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal surat keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dengan dalam saldo tambahan modal disetor.

Dalam paragraf 19 menerangkan tentang penyajian aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraph 7. Jika entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

Entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak, yang sebelumnya disajikan sesuai dengan paragraf 19 kedalam pos aset dan liabilitas serupa jika:

1. Entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai paragraf 16
2. Entitas memperoleh pengendalian atas *investee*

2.4 Kinerja Keuangan

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2015), kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan menurut Sucipto (2003) dalam Gunawan (2012), kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun menurut Fahmi (2015:239), Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard an ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Frinciple*) dan lainnya.

2.4.2 Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006), berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis persentase per komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis *break even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.4.3 Rasio Keuangan

Rasio keuangan atau *financial ratio* merupakan alat analisis keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas). Analisis rasio keuangan dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja untuk menemukan kelemahan dan keunggulan perusahaan.

Menurut Harahap (2015:298), analisa rasio mempunyai keunggulan sebagai berikut:

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (*Z-Score*).
5. Menstandarisasi *size* perusahaan.
6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*.
7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

Menurut Riyanto dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan (2010), pengelompokan rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas, adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan (*current ratio, acid test ratio*).
2. Rasio *leverage*, adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (*debt to total assets ratio, net worth to debt ratio* dan lain sebagainya).

3. Rasio-rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya (*inventory turnover, average collection period* dan lain sebagainya).
4. Rasio-rasio profitabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (*profit margin on sales, return on total assets, return on net worth* dan lain sebagainya).

Menurut Sunoto (2011), untuk menganalisis laporan keuangan beberapa rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi yakni likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aktivitas perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan petunjuk untuk kondisi-kondisi mendasar yang mungkin tidak tampak jelas dari masing-masing komponen laporan keuangan. bagi investor ada tiga rasio keuangan yang paling dominan yang dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan, yaitu:

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Rasio ini mengukur pada kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (utang yang dimaksud di sini adalah kewajiban perusahaan).

Rasio likuiditas antara lain:

- a. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentasi. Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini berarti bahwa

aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.

Rasio lancar dirumuskan:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Current Asset}}{\text{Total Current Liability}} \times 100\%$$

b. Rasio cepat (*quick ratio* atau *acid test ratio*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga *Acid Test Rasio*. Angka rasio ini tidak harus 100 % atau 1:1.

Rasio cepat dirumuskan:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Total Current Asset} - \text{Inventory}}{\text{Total Current Liability}} \times 100\%$$

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak *solvable* adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Namun harus dipahami bahwa bukan berarti perusahaan yang insolvabel namun likuid tapi tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Karena dengan kemampuan likuiditas yang dimilikinya sangat memungkinkan perusahaan tersebut untuk bisa mengembalikan utangnya dengan cepat dan tepat. Rasio solvabilitas antara lain:

a. *Debt to asset ratio* (*debt ratio*)

Debt ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Rasio ini dirumuskan:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. *Debt to equity ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang dan biasanya rasio ini dinyatakan dalam persentase. Bagi bank semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan, karena semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan, namun bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik.

Rasio ini dirumuskan:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Owner's Equity}} \times 100\%$$

3. Rasio Aktivitas

Munawir (2014:240) menyatakan bahwa rasio aktivitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio antara penjualan dengan total aktiva (TATO). Alasan peneliti menggunakan rasio ini karena TATO memperhitungkan seluruh aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan baik aset lancar maupun aset tetapnya dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi TATO maka akan

semakin baik bagi perusahaan karena menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari penggunaan aset.

4. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan (*profitability*), karena mereka mengharapkan dividen dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan.

2.4.4 Analisis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir 2010). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Kasmir (2010) sebagai berikut:

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan ini juga dikenal dengan nama *profit margin*. Rumus untuk mencari *Times Profit Margin (Profit Margin on Sales)* dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Profit margin} = \frac{\text{net sales} - \text{cost of goods sold}}{\text{sales}} \times 100\%$$

Rumus untuk margin bersih:

$$\text{Net Profit margin} = \frac{EAT}{\text{sales}} \times 100\%$$

2. *Return On Assets* (ROA)

Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan salah satu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus untuk mencari *Return on Assets* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{EAT}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

3. *Return on Equity* (ROE)

Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari ROE yaitu:

$$\text{Return on Equity} = \frac{EAT}{\text{Equity}} \times 100\%$$

4. Laba Per Lembar Saham

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemenang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumus laba per lembar saham yaitu:

$$\text{Laba per lembar saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya. Dalam rasio ini yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham.

6. Rasio Penilaian (*Valuation Ratio*)

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti:

- a. Rasio harga saham terhadap pendapatan
- b. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada table sebagai berikut:

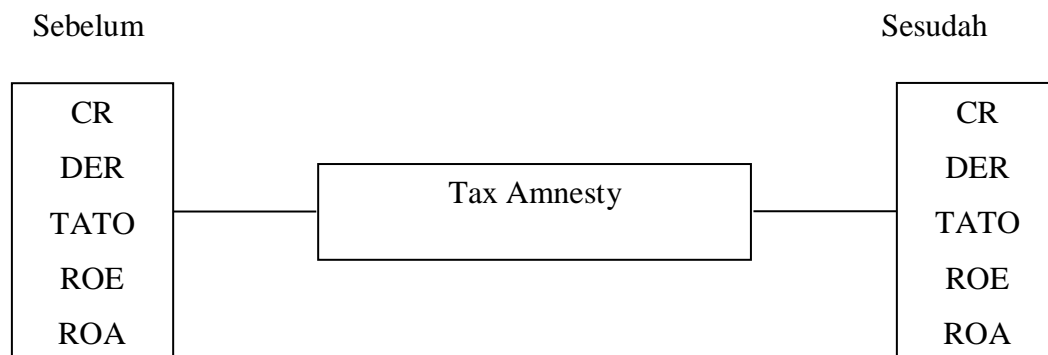
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Nugroho (2004)	Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000	<i>Return On Investment, Price Earning Ratio, time interest earned</i> dan <i>Debt To Equity Ratio, serta Return On Equity dan profit margin</i>	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan <i>Return On Investment, Price Earning Ratio, time interest earned</i> dan <i>Debt To Equity Ratio</i> antara sebelum dan setelah <i>tax reform</i> tahun 2000, terdapat perbedaan yang signifikan <i>Return On Equity dan profit margin</i> antara sebelum dan setelah <i>tax reform</i> tahun 2000

2.	Erlita (2010)	Analisis Pengaruh Reformasi Pajak Badan Tahun 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI.	CAR, NPM, ROA, dan RORA	Terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR, NPM dan ROA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, tidak ada perbedaan yang signifikan antara RORA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008.
3	Sunoto (2011)	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa EfeK Indonesia Periode 2007-2010. Universitas Negeri Semarang.	<i>return on assets, return on equity, debt to ratio dan price earnings ratio</i>	Terdapat peningkatan <i>return on assets</i> dan <i>return on equity</i> perusahaan manufaktur yang <i>go public</i> di BEI pada periode sesudah perubahan tarif pajak 2008, terdapat penurunan <i>debt to ratio dan price earnings ratio</i> perusahaan manufaktur yang <i>go public</i> di BEI pada periode sesudah perubahan tarif pajak 2008.
4	Anding Nugeraha <i>et.al</i> (2017)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Tax Amnesty Periode Pertama Pada Perusahaan Sub Sektor Properti & Real Estate Yang Terdaftar di BEI	<i>Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn Over dan Return On Equity</i>	Kinerja keuangan sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> periode pertama pada perusahaan <i>Pertambangan</i> yang diukur dengan rasio keuangannya yakni <i>Current Ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak lebih baik dari standar industri, sedangkan <i>Total Assets Turn Over</i> dan <i>Return On Equity</i> lebih baik dari standar industri, terdapat perbedaan yang signifikan CR, TATO dan ROE antara sebelum dan sesudah diberlakukannya <i>tax amnesty</i> periode pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan DER antara sebelum dan sesudah diberlakukannya <i>tax amnesty</i> periode pertama.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Perbedaan *Current Ratio* Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Current ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentasi. Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.

Hasil penelitian hasil penelitian Nugeraha *et.al* (2017) kinerja keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty* periode pertama pada perusahaan *Property & Real Estate* yang diukur dengan rasio keuangannya yakni *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* tidak lebih baik dari standar industri, sedangkan *Total Assets Turn*

Over dan *Return On Equity* lebih baik dari standar industri, terdapat perbedaan yang signifikan *Current ratio* antara sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama, sehingga penulis merumuskan:

H₁ : Terdapat perbedaan yang signifikan *Current Ratio* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tax Amnesty periode 2015-2016.

2.7.2 Perbedaan *Debt to Equity Ratio* Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang dan biasanya rasio ini dinyatakan dalam persentase. Bagi bank semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan, karena semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan, namun bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. sehingga penulis merumuskan:

H₂ : Terdapat perbedaan yang signifikan DER perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tax Amnesty periode 2015-2016.

2.7.3 Perbedaan TATO Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Munawir (2014:240) menyatakan bahwa rasio aktivitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio antara penjualan dengan total aktiva (TATO). Alasan peneliti menggunakan rasio ini karena TATO memperhitungkan seluruh aktiva (harta) yang dimiliki

perusahaan baik aset lancar maupaun aset tetapnya dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi TATO maka akan semakin baik bagi perusahaan karena menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari penggunaan aset.

Hasil penelitian hasil penelitian Nugeraha *et.al* (2017) kinerja keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty* periode pertama pada perusahaan *Property & Real Estate* yang diukur dengan rasio keuangannya yakni *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* tidak lebih baik dari standar industri, sedangkan *Total Assets Turn Over* dan *Return On Equity* lebih baik dari standar industri, terdapat perbedaan yang signifikan TATO antara sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama, sehingga penulis merumuskan:

H₃ : Terdapat perbedaan yang signifikan *Total Asset Turn Over* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tax Amnesty periode 2015-2016.

2.7.4 Perbedaan *Return On Equity* Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Hasil penelitian hasil penelitian Nugeraha *et.al* (2017) kinerja keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty* periode pertama pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang diukur dengan rasio keuangannya yakni *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* tidak lebih baik dari standar industri, sedangkan *Total Assets Turn Over* dan *Return On Equity* lebih baik dari standar industri, terdapat perbedaan yang signifikan *Return On Equity* antara sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama, sehingga penulis merumuskan:

H₄ : Terdapat perbedaan yang signifikan *Return On Equity* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tax Amnesty periode 2015-2016.

2.7.5 Perbedaan *Return On Asset* Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan salah satu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga penulis merumuskan:

H₅ : Terdapat perbedaan yang signifikan *Return On Asset* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tax Amnesty periode 2015-2016.